



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

---

### Diplomasi Parlementer: Diplomasi yang Demokratis



Dihadiri para duta besar dan perwakilan dari 81 negara sahabat, Wakil Menteri Luar Negeri, ratusan anggota DPR RI, dan pihak-pihak terkait, Ketua DPR RI Puan Maharani, Rabu (26/2/2020) di Gedung DPR meresmikan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan 102 parlemen dari pelbagai negara. Perhelatan yang digelar Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR kemarin ini sekaligus menandai geliat mewujudkan *'Postur Diplomasi Yang Disegani dan Berlandaskan Kepentingan Rakyat'* sebagai Visi Diplomasi Parlemen DPR RI periode 2019–2024.

Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI yang diketuai Fadli Zon (Ketua) dengan para wakil ketua Charles Honoris (F-PDIP), Putu Supadma Rudana (F-PD), Mardani Ali Sera (F-PKS) dan Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) tersebut adalah *focal point* seluruh aktifitas diplomasi parlemen yang pada periode 2019-2024 ini mengambil tema “Memperkuat Parlemen, Memperkokoh Kerja Sama Global”.

“DPR selama empat dekade lebih aktif menjalankan peran diplomasi yang sangat signifikan. Itu lantaran sentralitas parlemen yang fungsinya menentukan banyak sektor termasuk hubungan antarnegara. Terlebih dunia saat ini tampak seperti ‘rumah kecil’ daripada ‘desa kecil’ karena kemajuan pesat ICT (Teknologi Informasi dan

Komunikasi). Banyak peluang dan tantangan yang dihadapi banyak negara yang dewasa ini lebih saling terhubung dan saling memengaruhi. Sangat penting untuk merespons situasi seperti itu secara tepat. Kolaborasi dan kerja sama intensif antarpemangku kepentingan adalah kebutuhan mendesak,” papar Fadli Zon dalam sambutannya saat menjelaskan ihwal peran strategis diplomasi parlemen yang dimandatkan kepada BKSAP.

Dalam pidatonya yang berjudul *“Parliamentary Diplomacy: Diplomacy with a Democratic Mandate”*, Fadli Zon berpendapat bahwa diplomasi parlemen sama pentingnya dengan diplomasi pemerintah. “Terkadang diplomasi parlemen memiliki keunggulan spesifik dibandingkan dengan diplomasi eksekutif. Diplomasi parlemen lebih fleksibel terutama pada isu-isu sensitif,” imbuh dia.

Terkait peresmian GKSBB ini sendiri, doktor jebolan Universitas Indonesia itu menjelaskan komitmen BKSAP untuk mengokohkan peran diplomasi DPR secara bilateral dan multilateral. “Periode lalu kita bentuk GKSBB dengan 53 parlemen. Sekarang kita resmikan dengan 102 parlemen. Kerangka pijakannya adalah karena DPR ingin menjalin kerja sama yang lebih luas dengan lebih banyak parlemen.” sambung Fadli dalam sambutannya.



Fadli Zon juga menyampaikan bahwa BKSAP dalam rencana strategis lima tahunan telah merumuskan Kegiatan Strategis, antara lain diplomasi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR, memperkuat hubungan bilateral dan posisi DPR di kancah internasional, pentingnya *individual diplomacy*, dan peran DPR di organisasi antar parlemen dan dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* dan *open parliament*.

Di akhir sambutannya, Fadli Zon menekankan urgensi transparansi dan akuntabilitas pada setiap kegiatan diplomasi parlemen termasuk GKSBB. “Ada mekanisme dan prosedur yang telah kami rancang yang harus dipatuhi semua anggota DPR saat menjalankan fungsi diplomasinya. BKSAP benar-benar ingin misi diplomasi DPR *on the track* dan bermanfaat terutama bagi rakyat Indonesia,” pungkash dia.